

## LAMPIRAN 1

### Panduan GRI Aspek Anti Korupsi

#### Global Reporting Initiative (GRI) Aspek Anti korupsi Tahun 2013

Sumber: Global Reporting Initiative (2013)

#### Aspek: Anti korupsi

#### 1. G4-SO3

#### Jumlah dan Prosentase Operasi yang Dinilai Berkaitan dengan Risiko Korupsi dan Mengidentifikasi Risiko Korupsi

- a) Melaporkan mengenai jumlah dan prosentase operasi yang dinilai berkaitan dengan risiko korupsi
- b) Melaporkan mengenai risiko signifikansi korupsi yang diidentifikasi melalui penilaian risiko.

#### Panduan

#### Relevansi

Sistem dengan prosedur pendukung dibutuhkan untuk upaya mengelola risiko korupsi. Indikator ini mengukur sejauh mana organisasi menerapkan penilaian risiko korupsi. Potensi terjadinya korupsi di organisasi dibantu dinilai dengan penilaian risiko. Penilaian risiko juga untuk merancang kebijakan dan prosedur untuk memerangi korupsi yang nantinya akan membantu organisasi.

## **Penyusunan**

Identifikasi risiko terkait dengan korupsi pada operasi yang dinilai. Hal ini difokuskan pada korupsi atau penyertaan korupsi sebagai faktor risiko pada asesmen risiko resmi

## **Definisi**

### **a. Korupsi**

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang diamanatkan demi keuntungan pribadi dan dapat dipicu oleh perorangan atau organisasi. Dalam pedoman, praktik seperti suap, pembayaran pelicinan, penipuan, pemerasan, kolusi, dan pencucian uang merupakan bentuk dari korupsi. Hal ini juga mencakup penawaran dan penerimaan hadiah, pinjaman komisi, upah, atau keuntungan lainnya untuk atau dari siapa pun sebagai bujukan agar melakukan sesuatu yang tidak jujur, ilegal, atau melanggar kepercayaan dalam menyelenggarakan bisnis perusahaan. Hal ini dapat mencakup imbalan tunai atau non tunai, seperti barang gratis, hadiah, dan paket liburan, atau layanan pribadi khusus yang diberikan untuk tujuan keunggulan yang tidak patut atau yang dapat mengakibatkan desakan moral untuk menerima keunggulan tersebut.

### **b. Lokasi Operasi**

Lokasi yang digunakan untuk dilakukan aktivitas produksi, penyimpanan, dan atau distribusi barang dan jasanya, atau untuk tujuan administrative (seperti kantor) oleh perusahaan. Dalam satu lokasi operasi, mungkin

terdapat beberapa lini produksi, gudang, atau aktivitas lainnya. Misalnya, beberapa produk mungkin menggunakan satu pabrik atau beberapa aktivitas ritel yang berbeda mungkin menggunakan satu outlet atau ritel yang dimiliki atau dikelola oleh organisasi.

#### **Sumber Dokumentasi**

Sumber informasi potensial mencakup laporan pemantauan, pencatatan risiko atau sistem manajemen risiko

## **2. G4-SO4**

### **Komunikasi dan Pelatihan Terhadap Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi**

- a) Mengelompokkan menurut wilayah, laporan jumlah total dan persentase anggota badan tata kelola yang telah diinformasikan mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi organisasi.
- b) Mengelompokkan menurut kategori karyawan dan wilayah, laporan jumlah total dan persentase karyawan yang menginformasikan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi organisasi.
- c) Mengelompokkan menurut jenis mitra bisnis dan wilayah, laporan jumlah total dan persentase mitra bisnis tentang yang menginformasikan kebijakan dan prosedur anti korupsi.
- d) Mengelompokkan menurut kategori karyawan dan wilayah, laporan jumlah pelatihan mengenai anti korupsi dari total dan persentase anggota badan tata kelola.

- e) Mengelompokkan menurut kategori karyawan dan wilayah, laporan jumlah total dan persentase pelatihan anti korupsi yang telah diterima oleh karyawan.

**Panduan**

**Relevansi**

Komunikasi dan pelatihan membangun kesadaran internal dan eksternal dan kapasitas yang diperlukan untuk memerangi korupsi. Proporsi anggota badan tata kelola, karyawan dan mitra bisnis organisasi secara wajar diasumsikan mengetahui kebijakan dan prosedur anti korupsi disingkat dalam indikator ini.

**Penyusunan**

Dengan menggunakan data dari G4-LA12, identifikasi:

- Badan tata kelola yang terdapat di organisasi, seperti dewan direksi, komite manajemen, atau lembaga serupa untuk organisasi non-korporat
- Jumlah total individu dan atau karyawan yang membentuk badan tata kelola tersebut.

**Definisi**

- a) Karyawan  
Karyawan dari organisasi yang individu yang berdasar hukum atau praktik nasional diakui sebagai karyawan dari organisasi.
- b) Kategori karywan

Mengelompokkan karyawan berdasarkan tingkatan, seperti: manajemen senior, manajemen menengah dan fungsi, seperti: teknis, administrative, dan produksi. Informasi ini berasal dari organisasi yang memiliki sistem sumber daya manusia.

c) Korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam pedoman, korupsi mencakup praktik seperti suap, pembayaran pelican, pinipuan, pemerasan, kolusi, dan pencucian uang. Hal ini meliputi penawaran dan penerimaan hadiah, pinjaman, komisi, upah, atau keuntungan lainnya untuk atau dari siapapun sebagai bentuk bujukan untuk melaksanakan sesuatu yang tidak jujur, illegal atau akan melanggar kepercayaan dalam menjalankan bisnis perusahaan. Hal ini meliputi imbalan tunai atau non tunai, seperti hadiah, paket liburan, atau layanan khusus yang diberikan untuk tujuan keunggulan yang tidak patut atau yang bisa menjadikan desakan moral untuk menerima keunggulan tersebut.

d) Mitra Bisnis

Mitra bisnis meliputi pemasok, agen, pelobi dan perantara lainnya, mitra usaha venturan dan konsorsium, pemerintah, dan pelanggan. Didalam pedoman, pemasok meliputi makelar, kontraktor, konsultan, distributor, penerima waralaba atau penerima lisensi, pekerja dari rumah, kontraktor independen, pabrikan, produsen utama, subkontraktor, dan pemborong.

## Sumber Dokumentasi

Sumber informasi potensial mencakup catatan pelatihan.

### 3. G4-S05

#### **Insiden Korupsi yang Terbukti dan Tindakan yang Diambil**

- a. Laporan jumlah total dan sifat korupsi yang terbukti.
- b. Laporan jumlah total insiden terbukti dimana karyawan dikenakan pemutusan hubungan kerja atau sanksi disiplin karena korupsi.
- c. Laporan jumlah total insiden yang terbukti saat kontrak dengan mitra bisnis diakhiri atau tidak diperpanjang karena pelanggaran terkait korupsi.
- d. Laporan khusus atas kasus hukum public terkait korupsi yang diajukan terhadap organisasi atau karyawan selama periode pelaporan dan hasil dari kasus tersebut.

#### **Panduan**

#### **Relevansi**

Korupsi dapat menjadi risiko signifikan bagi reputasi dan bisnis organisasi.

Kemiskinan dalam perekonomian transisi, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan demokrasi, kesalahan mengalokasikan investasi, dan mengacu aturan hukum, hal ini menghubungkan secara luas dampak negatif.

Organisasi semakin diharapkan mampu memperlihatkan ketaatan mereka terhadap praktik integritas, tata kelola dan bisnis yang baik oleh pasar, norma internasional,

dan pemangku kepentingan. Indikator ini menunjukkan tindakan tertentu yang diambil untuk membatasi paparan terhadap risiko korupsi, untuk pemangku kepentingan, terdapat kepentingan baik terhadap terjadinya insiden maupun respon dari organisasi.

### **Penyusunan**

Mengidentifikasi jumlah total insiden korupsi yang terbukti. Insiden korupsi yang telah dibuktikan mengacu pada setiap kasus korupsi individual yang diketahui telah dibuktikan dengan fakta-fakta identifikasi sifat dari insiden korupsi yang terjadi. Kasus hukum public terkait korupsi termasuk investigasi public yang sedang berjalan, penuntutan, atau kasus yang telah diselesaikan.

### **Definisi**

a. Insiden Korupsi yang Terbukti

Insiden korupsi yang telah dibuktikan. Hal ini tidak termasuk insiden korupsi yang masih dalam penyelidikan tatkala periode pelaporan

b. Karyawan

Individu yang berdasarkan hukum atau praktik nasional, diakui sebagai karyawan dari organisasi.

c. Korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi demi mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam pedoman, korupsi mencakup praktik seperti suap, pembayaran pelican,

penipuan, pemerasan, kolusi, dan pencucian uang. Hal ini meliputi penawaran dan penerimaan hadiah, pinjaman, komisi, upah, atau keuntungan lainnya untuk atau dari siapapun sebagai bentuk bujukan untuk melaksanakan sesuatu yang tidak jujur, illegal atau akan melanggar kepercayaan dalam menjalankan bisnis perusahaan. Hal ini meliputi imbalan tunai atau non tunai, seperti hadiah, paket liburan, atau layanan khusus yang diberikan untuk tujuan keunggulan yang tidak patut atau yang bisa menjadikan desakan moral untuk menerima keunggulan tersebut.

d. Mitra Bisnis

Mitra bisnis meliputi pemasok, agen, pelobi dan perantara lainnya, mitra usaha venturan dan konsorsium, pemerintah, dan pelanggan. Didalam pedoman, pemasok meliputi makelar, kontraktor, konsultan, distributor, penerima waralaba atau penerima lisensi, pekerja dari rumah, kontraktor independen, pabrikan, produsen utama, subkontraktor, dan pemborong.

**Sumber Dokumentasi**

Sumber informasi potensial meliputi catatan kasus bagaian legal yang diajukan terhadap organisasi, karyawan, atau mitra bisnis; berita acara dengar pendapat disipliner internal; dan kontrak dengan mitra bisnis.



LAMPIRAN 2

Penelitian Terdahulu untuk Menentukan Pelaporan Anti Korupsi

No	Nama Peneliti	Teori	Sumber Data	Sampel	Variabel	Hasil
1.	(Halter et al., 2009)	Tidak disebutkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara perwakilan perusahaan</li> <li>• Wawancara dengan suplier</li> </ul>	Perusahaan multinasional yang ada di Brazil dengan jumlah karyawan 40.000 diseluruh dunia.	<u>Dependen:</u> Korupsi  <u>Independen:</u> Transparansi	Salah satu inisiatif mengurangi korupsi paling penting dapat dengan jelas diberikan oleh transparansi informasi dan komunikasi kode etik dalam organisasi.
2.	(Halter, de Arruda, & Halter, 2009)	Tidak disebutkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan keberlanjutan</li> <li>• Pelaporan anti korupsi</li> </ul>	Perusahaan sektor privat	Dependen: Korupsi  Independen: Prinsip perusahaan	Sektor publik perlu mengeksplorasi cara-cara itu dapat mempengaruhi adopsi dan implementasi prinsip-prinsip perusahaan untuk benar-benar mengatalisasi komitmen perusahaan untuk memerangi korupsi.

3.	(Hess, 2009)	Teori Institutional	Laporan Keberlanjutan dan Laporan Tahunan	Tujuh sektor perusahaan (perbankan; konstruksi; listrik; logam industri; pertambangan; minyak & gas dan akhirnya gas, air & multi-utilitas) yang menerbitkan laporan tahunan dan keberlanjutan pada tahun 2006-2009.	<p>Dependen:</p> <p>Indikator GRI SO2, SO3, dan SO4</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekanan tingkat negara dan tingkat regional</li> <li>• Tekanan tingkat sektoral</li> <li>• Tekanan global</li> </ul>	Perusahaan-perusahaan Asia Selatan dan Timur ternyata memiliki tingkat cakupan indikator GRI yang tinggi tentang korupsi, sedangkan negara-negara Eropa Timur menunjukkan tingkat yang sangat rendah
4.	(Barkemeyer et al., 2015)	Tidak disebutkan.	laporan transparansi perusahaan dan pelaporan korupsi	Perusahaan Amerika yang ada di Transparency International dan menerbitkan laporan transparansi perusahaan dan pelaporan anti korupsi.	<p>Dependen:</p> <p>Pengungkapan Anti-Korupsi</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paparan Media</li> <li>• Kebebasan per</li> </ul>	Reaksi pasar rata-rata terhadap rilis laporan TI pertama adalah negatif dan signifikan secara statistik.

5.	(Blanc et al., 2016)	Tidak disebutkan.	pengungkapan antikorupsi perusahaan berasal dari Transparency International (TI)	500 perusahaan terkemuka dari Forbes 'Maret 2007 Global 2000, termasuk 250 perusahaan terbesar yang terdaftar, 107 perusahaan dari sektor berisiko tinggi, dan 143 perusahaan dari 25 negara pengeksport global teratas.	<p>Dependen:</p> <p>Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Peringkat Anti korupsi perusahaan</p> <p>Independen:</p> <p><i>Corporate Governance</i></p>	<p>Perkiraan korupsi di negara asal positif menyiratkan bahwa perusahaan-perusahaan dari negara asal yang kurang korup memiliki peringkat lebih tinggi.</p> <p>Peningkatan persentase direktur independen berkaitan dengan peningkatan peringkat antikorupsi.</p>
6.	(Healy & Serafeim, 2016)	Tidak disebutkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dow Jones Factiva database.</li> </ul>	Peringkat Transparency International tahun 2012 tentang pengungkapan anti korupsi oleh 105 perusahaan multinasional terbesar di dunia	<p>Dependen:</p> <p>Pengungkapan anti korupsi</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Paparan media</li> <li>Kebebasan press</li> </ul>	<p>Paparan media secara positif terkait dengan perbedaan dalam pengungkapan anti-korupsi perusahaan sampel.</p> <p>Pengungkapan kurang luas di mana kebebasan pers negara asal lebih dibatasi dan berkurangnya kebebasan pers tampaknya mengurangi dampak paparan media terhadap pengungkapan tersebut.</p>

7.	(Blanc et al., 2017)	<i>Coercive isomorphism</i>	Forum group interview 10 perusahaan dengan praktik CSR terbaik	10 perusahaan dinominasikan dalam Indonesia CSR Award 2014	<p>Dependen: Praktik anti korupsi</p> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan berdasarkan industri</li> <li>• Perusahaan berdasarkan kepemilikan</li> </ul>	Praktik ACP di perusahaan praktik berbasis CSR di Indonesia berlaku untuk aktivitas bisnis umum dan tidak khusus untuk aktivitas CSR, seperti amal, sponsor, donasi, dan keterlibatan masyarakat.
8.	(Gunawan & Joseph, 2017)	Teori Legitimasi  Teori <i>Media-agenda setting</i>	Laporan keberlanjutan Perusahaan di sektor telekomunikasi dari tahun 1995-2010	Perusahaan di sektor telekomunikasi dari tahun 1995-2010	<p>Dependen: Pengungkapan <i>anti-bribery</i></p> <p>Independen: Perhatian media terhadap perusahaan</p>	Pengungkapannya secara signifikan terkait dengan perhatian media.

9.	(Islam et al., 2018)	Teori Institusional	Laporan keberlanjutan 66 perusahaan Gulf Council (GCC) tahun 2014.	66 perusahaan Gulf Council (GCC) tahun 2014.	<p>Dependen: Praktik pengungkapan anti korupsi</p> <p>Independen: <i>Good Corporate Governance</i></p>	Peningkatan signifikan dalam pentingnya pelaporan anti-korupsi, mengurangi korupsi, secara global.
----	----------------------	---------------------	--	--	--	--

LAMPIRAN 3

DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL YANG MENERBITKAN SUSTAINABILITY REPORT

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	2014	2015	2016	2017
1	ADHI	PT Adhi Karya Tbk.	1	1	1	1
2	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk.	1	1	1	1
3	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.	1	1	1	1
4	BBNI	PT Bank Negara Indonesia Tbk.	1	1	1	1
5	BBTN	PT Bank Tabungan Negara Tbk.	1	1	1	1
6	BMRI	PT Bank Mandiri Tbk.	1	1	1	1
7	GIAA	PT Garuda Indonesia Tbk.	1	1	1	1
8	INAF	PT Indo Farma Tbk.	0	0	0	0
9	JSMR	PT Jasa Marga Tbk.	1	1	1	1
10	KAEF	PT Kimia Farma Tbk.	0	0	0	0
11	KRAS	PT Krakatau Steel Tbk.	0	0	0	0
12	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	1	1	1	1

13	PTPP	PT Pembangunan Perumahan Tbk.	0	1	0	1
14	PTBA	PT Bukit Asam Tbk.	1	1	1	0
15	SMBR	PT Semen Baturaja Tbk.	0	0	0	0
16	SMGR	PT Semen Indonesia Tbk.	1	1	1	1
17	TINS	PT Timah Tbk.	0	0	0	1
18	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.	1	1	1	0
19	WIKA	PT Wijaya Karya Tbk.	1	1	1	1
20	WSKT	PT Waskita Karya Tbk.	0	0	0	1

Keterangan:

1 = Perusahaan yang menerbitkan sustainability report

0 = Perusahaan yang tidak menerbitkan sustainability report

**LAMPIRAN 4**  
**DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL**

No	Kode Perusahaan	Perusahaan
1	ADHI	PT Adhi Karya Tbk.
2	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk.
3	BBNI	PT Bank Negara Indonesia Tbk.
4	BBRI	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
5	BBTN	PT Bank Tabungan Negara Tbk.
6	BMRI	PT Bank Mandiri Tbk.
7	INAF	PT Indo farma Tbk.
8	JSMR	PT Jasa Marga Tbk.
9	KAEF	PT Kimia Farma Tbk.
10	KRAS	PT Krakatau Steel Tbk.
11	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
12	PTBA	PT Bukit Asam Tbk.
13	PTPP	PT Pembangunan Perumahan Tbk.
14	SMBR	PT Semen Baturaja Tbk.
15	TINS	PT Timah Tbk.
16	TLKM	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
17	WIKA	PT Wijaya Karya Tbk.
18	WSKT	PT Waskita Karya Tbk.
19	GIAA	PT Garuda Indonesia Tbk.
20	SMGR	PT Semen Indonesia Tbk.



LAMPIRAN 5

TABEL CORPORATE GOVERNANCE SCORE

No	Karakteristik GCG	Kode	Ketentuan
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris	A	> 5
2	Komisaris Independen	B	> 50%
3	Terdapat anggota Komisaris yang merangkap sebagai Direksi	C	Tidak
4	Jumlahnya rapat Dewan Komisaris dalam setahun (periode laporan tahunan)	D	> 10
5	Identitas dan reputasi auditor eksternal	E	Termasuk dalam "Big 4"
6	Memiliki Komite <i>Social Responsibility</i>	F	Iya
7	Memiliki Komite Audit	G	Iya
8	Memiliki Komite <i>Remuneration</i>	H	Iya
9	Memiliki Komite <i>Nomination</i>	I	Iya

LAMPIRAN 6

Variabel Dependen

Pelaporan Anti Korupsi

		SO3	SO4	SO5	TOTAL
Adhi Karya	2014	0	28	0	28
	2015	0	28	0	28
	2016	0	973	32	1005
	2017	0	1095	31	1126
Aneka Tambang	2014	93	525	83	701
	2015	50	633	48	731
	2016	0	469	166	635
	2017	0	223	42	265
Bank BNI	2014	61	266	153	480
	2015	76	260	146	482
	2016	0	839	126	965

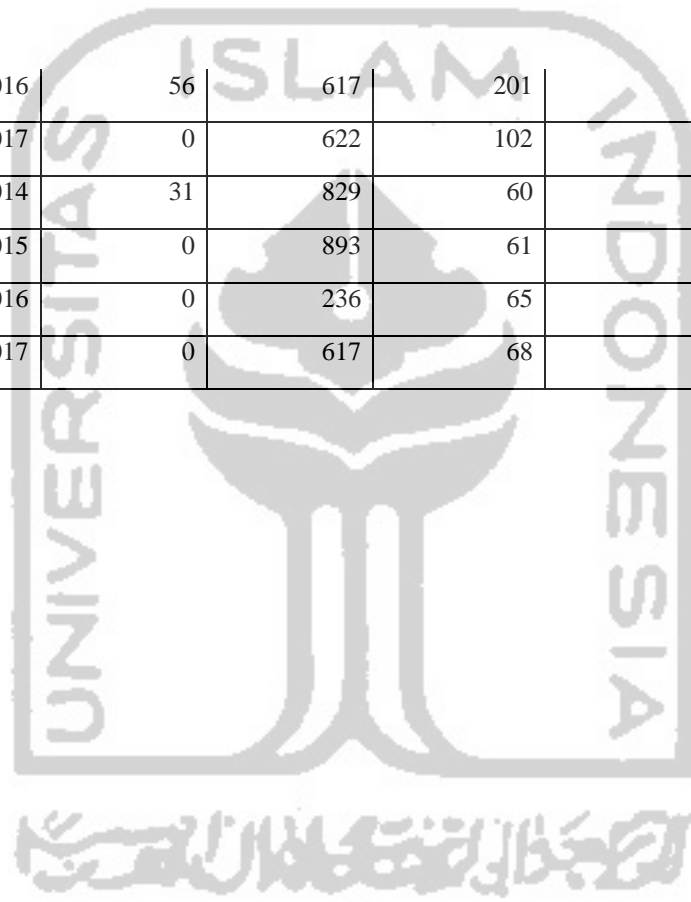
	2017	0	870	134	1004
<b>Bank BRI</b>	2014	0	497	34	531
	2015	95	412	95	602
	2016	0	590	83	673
	2017	0	496	105	601
<b>Bank BTN</b>	2014	85	880	32	997
	2015	0	723	75	798
	2016	0	369	58	427
	2017	113	1071	76	1260
<b>Bank Mandiri</b>	2014	67	530	35	632
	2015	140	325	47	512
	2016	90	400	54	544
	2017	0	635	22	657
<b>Indo Farma</b>	2014	0	518	58	576
	2015	43	537	53	633
	2016	26	670	25	721

	2017	41	554	48	643
Jasa Marga	2014	0	753	34	787
	2015	0	686	37	723
	2016	0	757	34	791
	2017	0	759	34	793
Kimia Farma	2014	0	72	13	85
	2015	43	264	9	316
	2016	50	135	49	234
	2017	46	375	21	442
Krakatau Steel	2014	54	502	40	596
	2015	0	149	47	196
	2016	0	162	18	180
	2017	53	106	103	262
Perusahaan Gas Negara	2014	145	1621	19	1785
	2015	197	1340	19	1556
	2016	104	1532	19	1655

	2017	216	1414	19	1649
Bukit Asam	2014	124	583	18	725
	2015	124	561	16	701
	2016	45	840	26	911
	2017	0	792	24	816
Pembangunan Perumahan	2014	0	817	34	851
	2015	0	816	58	874
	2016	0	850	53	903
	2017	0	745	86	831
Semen Baturaja	2014	47	106	22	175
	2015	0	719	0	719
	2016	0	378	37	415
	2017	0	377	32	409
Timah	2014	135	586	31	752
	2015	69	456	0	525

	2016	72	974	13	1059
	2017	0	1815	61	1876
Telkom Indonesia	2014	0	310	43	353
	2015	0	320	32	352
	2016	0	803	40	843
	2017	97	643	40	780
Wijaya Karya	2014	0	421	10	431
	2015	0	815	13	828
	2016	0	851	11	862
	2017	0	909	16	925
Waskita Karya	2014	0	498	13	511
	2015	0	499	14	513
	2016	0	479	19	498
	2017	0	847	23	870
Garuda Indonesia	2014	66	418	154	638
	2015	41	617	117	775

	2016	56	617	201	874
	2017	0	622	102	724
<b>Semen Indonesia</b>	2014	31	829	60	920
	2015	0	893	61	954
	2016	0	236	65	301
	2017	0	617	68	685



LAMPIRAN 7

Variabel Independen

*Praktik Good Corporate Governance*

		Indeks	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Adhi Karya	2014	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2015	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2016	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2017	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
Aneka Tambang	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Bank BNI	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
	2016	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8



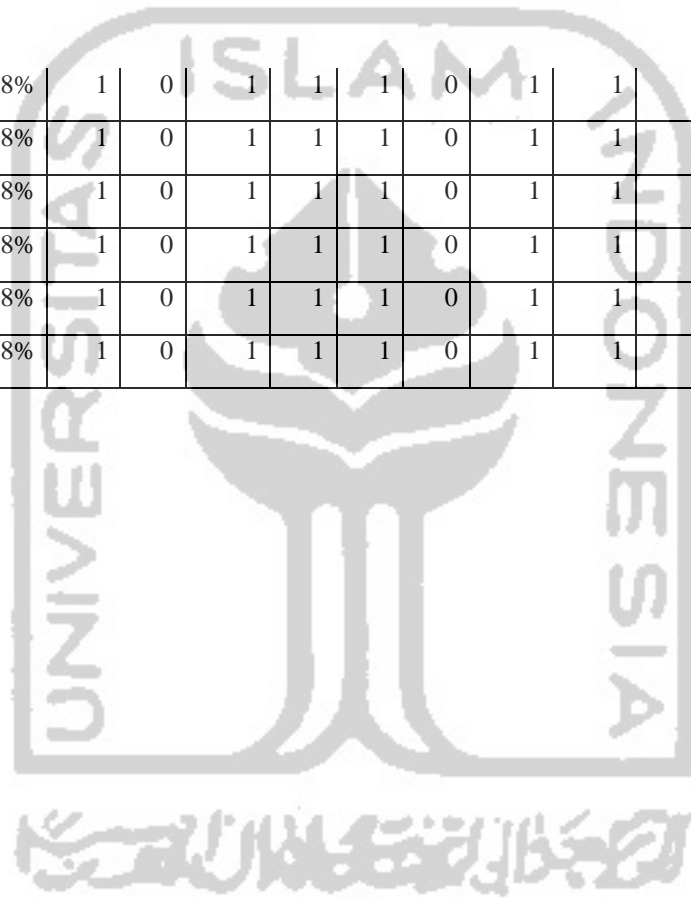
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Bank BRI	2014	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
	2015	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
	2016	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
	2017	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
Bank BTN	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Bank Mandiri	2014	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
	2015	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Indo Farma	2014	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
	2015	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
	2016	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5

	2017	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
Jasa Marga	2014	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Kimia Farma	2014	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
	2015	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
	2016	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
	2017	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
Krakatau Steel	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2016	66,67%	0	0	1	1	1	0	1	1	1	6
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Perusahaan Gas Negara	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7

	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Bukit Asam	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Pembangunan Perumahan	2014	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
	2015	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2016	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Semen Baturaja	2014	66,67%	0	1	1	1	0	0	1	1	1	6
	2015	66,67%	0	1	1	1	0	0	1	1	1	6
	2016	66,67%	0	1	1	1	0	0	1	1	1	6
	2017	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
Timah	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7

	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	77,78%	0	1	1	1	1	0	1	1	1	7
Telkom Indonesia	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	88,89%	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
Wijaya Karya	2014	55,56%	0	0	1	1	0	0	1	1	1	5
	2015	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2016	55,56%	1	0	1	0	0	0	1	1	1	5
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Waskita Karya	2014	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2015	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2016	66,67%	1	0	1	1	0	0	1	1	1	6
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Garuda Indonesia	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7

	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
Semen Indonesia	2014	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2015	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2016	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7
	2017	77,78%	1	0	1	1	1	0	1	1	1	7



## LAMPIRAN 8

### Variabel Independen

#### Kepemilikan Pemerintah

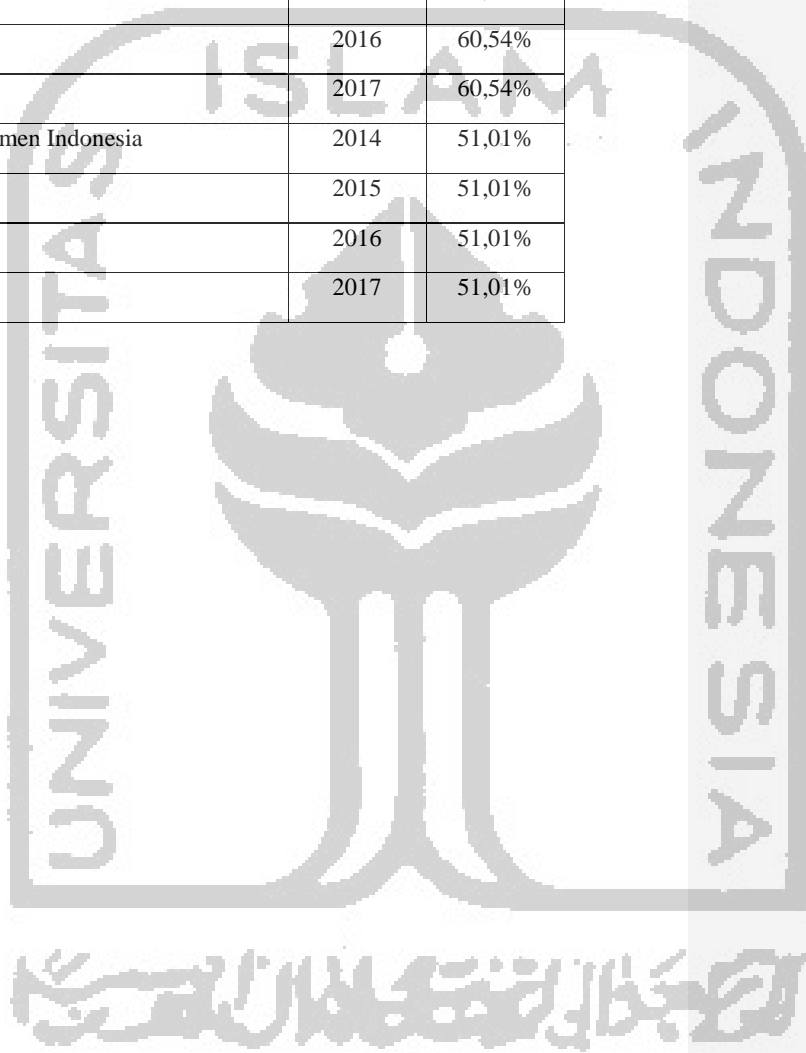
Adhi Karya	2014	51%
	2015	51%
	2016	51%
	2017	51%
Aneka Tambang	2014	65%
	2015	65%
	2016	65%
	2017	65%
Bank BNI	2014	60%
	2015	60%
	2016	60%
	2017	60%
Bank BRI	2014	56,75%
	2015	56,75%
	2016	56,75%
	2017	56,75%
Bank BTN	2014	60,13%
	2015	60,04%
	2016	60%
	2017	60%
Bank Mandiri	2014	60%
	2015	60%

	2016	60%
	2017	60%
Indo Farma	2014	80,66%
	2015	80,66%
	2016	80,66%
	2017	80,66%
Jasa Marga	2014	70%
	2015	70%
	2016	70%
	2017	70%
Kimia Farma	2014	90,03%
	2015	90,03%
	2016	90,03%
	2017	90,03%
Krakatau Steel	2014	80%
	2015	80%
	2016	80%
	2017	80%
Perusahaan Gas Negara	2014	56,96%
	2015	56,96%
	2016	56,96%
	2017	56,96%
Bukit Asam	2014	65,02%
	2015	65,02%
	2016	65,02%

	2017	65,01%
Pembangunan Perumahan	2014	51%
	2015	51%
	2016	51%
	2017	51%
Semen Baturaja	2014	76,24%
	2015	76,24%
	2016	76,24%
	2017	75,57%
Timah	2014	65%
	2015	65%
	2016	65%
	2017	65%
Telkom Indonesia	2014	52,56%
	2015	52,55%
	2016	52,09%
	2017	52,09%
Wijaya Karya	2014	65,05%
	2015	65,05%
	2016	65,05%
	2017	65,05%
Waskita Karya	2014	67,33%
	2015	66,04%
	2016	66,04%
	2017	66,04%



Garuda Indonesia	2014	60,50%
	2015	60,51%
	2016	60,54%
	2017	60,54%
Semen Indonesia	2014	51,01%
	2015	51,01%
	2016	51,01%
	2017	51,01%



## LAMPIRAN 9

### Variabel Independen

#### Kekuatan Dewan Direksi

Adhi Karya	2014	1
	2015	0
	2016	1
	2017	1
Aneka Tambang	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Bank BNI	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Bank BRI	2014	0
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Bank BTN	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Bank Mandiri	2014	1
	2015	1

	2016	1
	2017	1
Indo Farma	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Jasa Marga	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Kimia Farma	2014	0
	2015	1
	2016	0
	2017	1
Krakatau Steel	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Perusahaan Gas Negara	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	0
Bukit Asam	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1

Pembangunan Perumahan	2014	0
	2015	0
	2016	1
	2017	1
Semen Baturaja	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	1
Timah	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Telkom Indonesia	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Wijaya Karya	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Waskita Karya	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Garuda Indonesia	2014	1
	2015	1

	2016	1
	2017	1
Semen Indonesia	2014	1
	2015	1
	2016	0
	2017	1

Keterangan:

1 = Direksi yang mempunyai saham pada perusahaan

0 = Direksi yang tidak mempunyai saham pada perusahaan

**LAMPIRAN 10**

**Variabel Kontrol**

**Tipe Industri**

Adhi Karya	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Aneka Tambang	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Bank BNI	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Bank BRI	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Bank BTN	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Bank Mandiri	2014	1
	2015	1

	2016	1
	2017	1
Indo Farma	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Jasa Marga	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Kimia Farma	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Krakatau Steel	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Perusahaan Gas Negara	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Bukit Asam	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0

Pembangunan Perumahan	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Semen Baturaja	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Timah	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Telkom Indonesia	2014	1
	2015	1
	2016	1
	2017	1
Wijaya Karya	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Waskita Karya	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0
Garuda Indonesia	2014	1
	2015	1

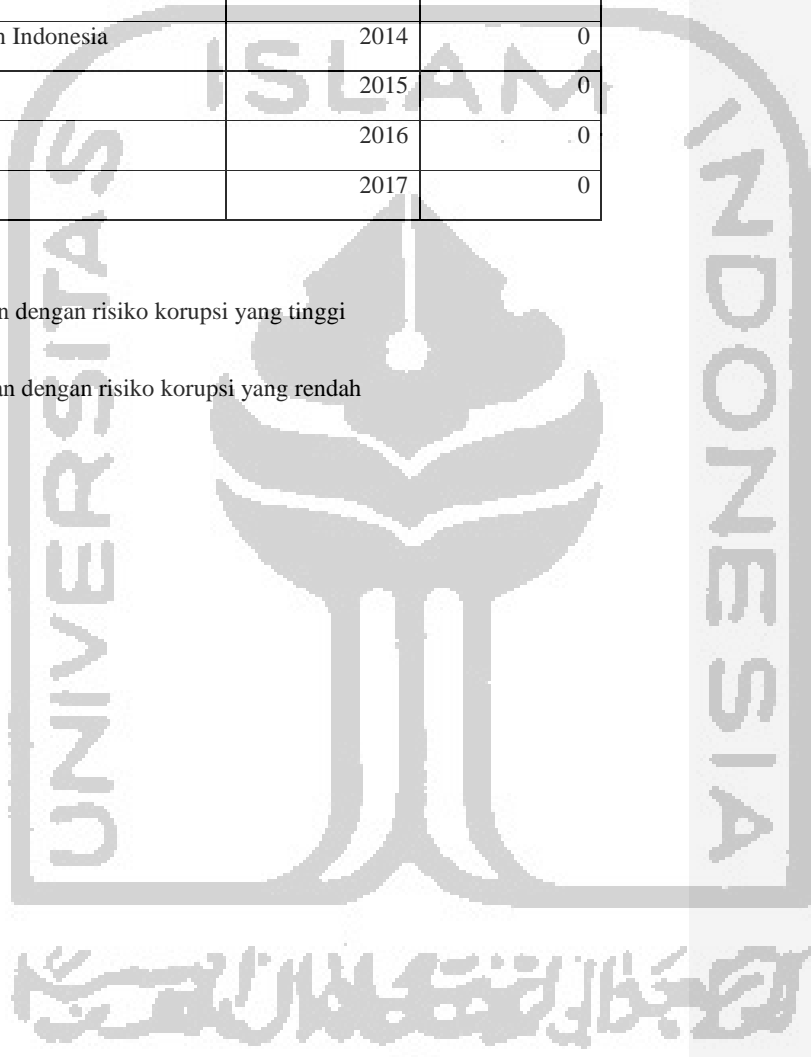


	2016	1
	2017	1
Semen Indonesia	2014	0
	2015	0
	2016	0
	2017	0

Keterangan:

1 = Perusahaan dengan risiko korupsi yang tinggi

0 = Perusahaan dengan risiko korupsi yang rendah



LAMPIRAN 11

Variabel Kontrol  
Kinerja Keuangan

Adhi Karya	2014	3,24%
	2015	3,42%
	2016	1,71%
	2017	2,14%
Aneka Tambang	2014	-3,53%
	2015	-5,50%
	2016	0,21%
	2017	0,46%
Bank BNI	2014	2,70%
	2015	1,98%
	2016	2,05%
	2017	2,10%
Bank BRI	2014	3,40%
	2015	3,02%
	2016	2,79%
	2017	0,48%
Bank BTN	2014	0,81%
	2015	0,29%
	2016	0,34%
	2017	0,32%
Bank Mandiri	2014	2,60%

	2015	2,40%
	2016	1,50%
	2017	1,98%
Indo Farma	2014	0,09%
	2015	0,76%
	2016	-1,51%
	2017	-0,07%
Jasa Marga	2014	4,04%
	2015	3,85%
	2016	4,00%
	2017	3,16%
Kimia Farma	2014	8,70%
	2015	8,15%
	2016	6,92%
	2017	6,20%
Krakatau Steel	2014	-6,36%
	2015	-10,80%
	2016	-4,67%
	2017	-2,15%
Perusahaan Gas Negara	2014	14,31%
	2015	6,66%
	2016	4,57%
	2017	2,26%
Bukit Asam	2014	15,25%
	2015	12,85%
	2016	10,86%

	2017	20,72%
Pembangunan Perumahan	2014	3,94%
	2015	5,01%
	2016	4,57%
	2017	4,72%
Semen Baturaja	2014	11,65%
	2015	11,43%
	2016	6,78%
	2017	3,11%
Timah	2014	7,53%
	2015	1,07%
	2016	2,68%
	2017	4,69%
Telkom Indonesia	2014	15,95%
	2015	15,19%
	2016	16,87%
	2017	17,30%
Wijaya Karya	2014	1,95%
	2015	3,26%
	2016	5,43%
	2017	3,53%
Waskita Karya	2014	4,70%
	2015	4,89%
	2016	3,95%
	2017	5,27%

Garuda Indonesia	2014	-12,33%
	2015	2,55%
	2016	0,26%
	2017	-5,71%
Semen Indonesia	2014	17,12%
	2015	12,49%
	2016	11,01%
	2017	4,38%

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 كليات جامعة إندونيسيا الإسلامية

## LAMPIRAN 12

### Variabel Kontrol

#### Ukuran Perusahaan

Adhi Karya	2014	10.458.881.684.274
	2015	16.761.063.514.879
	2016	20.095.435.959.279
	2017	28.332.948.012.950
Aneka Tambang	2014	22.044.202.220.000
	2015	30.356.850.890.000
	2016	29.981.535.812.000
	2017	30.014.273.452.000
Bank BNI	2014	416.573.708.000.000
	2015	508.595.288.000.000
	2016	603.031.880.000.000
	2017	709.330.084.000.000
Bank BRI	2014	801.955.021.000.000
	2015	878.426.312.000.000
	2016	1.003.644.426.000.000
	2017	11.126.248.442.000.000
Bank BTN	2014	144.575.961.000.000
	2015	171.807.592.000.000
	2016	214.168.479.000.000
	2017	261.365.267.000.000
Bank Mandiri	2014	855.039.673.000.000
	2015	910.063.409.000.000

	2016	1.038.706.009.000.000
	2017	1.124.700.847.000.000
Indo Farma	2014	1.248.343.275.406
	2015	921.548.277.156
	2016	1.381.633.321.120
	2017	1.203.169.923.100
Jasa Marga	2014	31.857.947.989.000
	2015	36.724.982.487.000
	2016	53.500.322.659.000
	2017	79.192.772.790.000
Kimia Farma	2014	2.968.184.626.297
	2015	3.236.224.000.000
	2016	4.612.562.541.064
	2017	6.096.148.972.533
Krakatau Steel	2014	32.163.279.894.000
	2015	50.815.628.544.000
	2016	52.629.916.097.000
	2017	55.461.923.280.000
Perusahaan Gas Negara	2014	76.935.413.931.702
	2015	89.150.675.554.486
	2016	91.365.791.029.192
	2017	84.831.378.798.680
Bukit Asam	2014	14.812.023.000.000
	2015	16.894.043.000.000
	2016	18.576.774.000.000

	2017	21.987.482.000.000
Pembangunan Perumahan	2014	14.611.864.850.970
	2015	19.128.811.782.419
	2016	31.232.766.567.390
	2017	41.782.780.915.111
Semen Baturaja	2014	2.926.360.857.000
	2015	3.268.667.933.000
	2016	4.368.876.996.000
	2017	5.060.337.247.000
Timah	2014	9.752.477.000.000
	2015	9.279.683.000.000
	2016	9.548.631.000.000
	2017	11.876.309.000.000
Telkom Indonesia	2014	140.895.000.000.000
	2015	166.173.000.000.000
	2016	179.611.000.000.000
	2017	198.484.000.000.000
Wijaya Karya	2014	15.915.162.000.000
	2015	11.170.044.734.000
	2016	31.096.539.490.000
	2017	45.683.774.302.000
Waskita Karya	2014	12.542.041.344.848
	2015	30.309.111.177.468
	2016	61.425.181.722.030
	2017	97.895.760.838.624



Garuda Indonesia	2014	38.381.900.175.684
	2015	45.433.210.793.836
	2016	49.967.565.174.910
	2017	50.729.177.413.640
Semen Indonesia	2014	34.314.668.027.000
	2015	38.153.118.932.000
	2016	44.226.895.982.000
	2017	48.963.502.966.000

Keterangan: dalam satuan rupiah penuh

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
 كَوْنُوا فِي عِلْمٍ وَتَقْوَى

LAMPIRAN 13

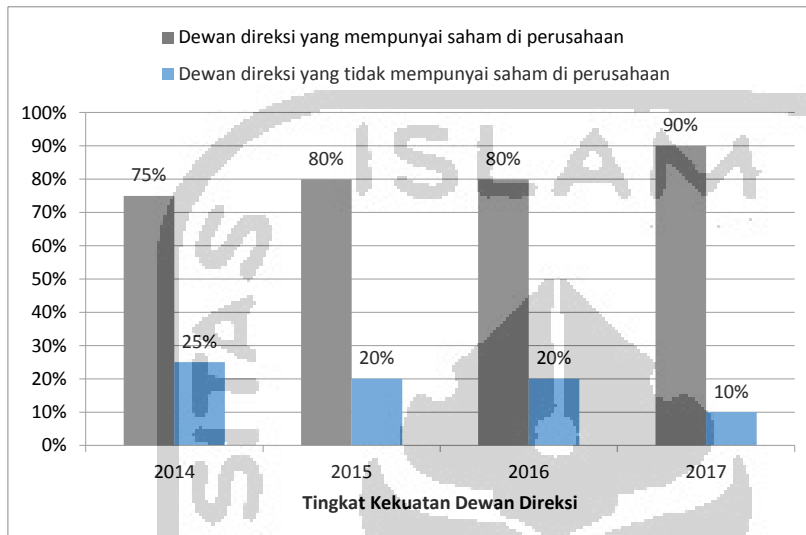
OUTPUT SPSS

Statistik Deskriptif Variabel Independen diukur secara *Continuous*

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Praktik <i>Good corporate governane</i>	80	,56	,89	,7375	,09882
Kepemilikan pemerintah	80	,51	,90	,6414	,10572

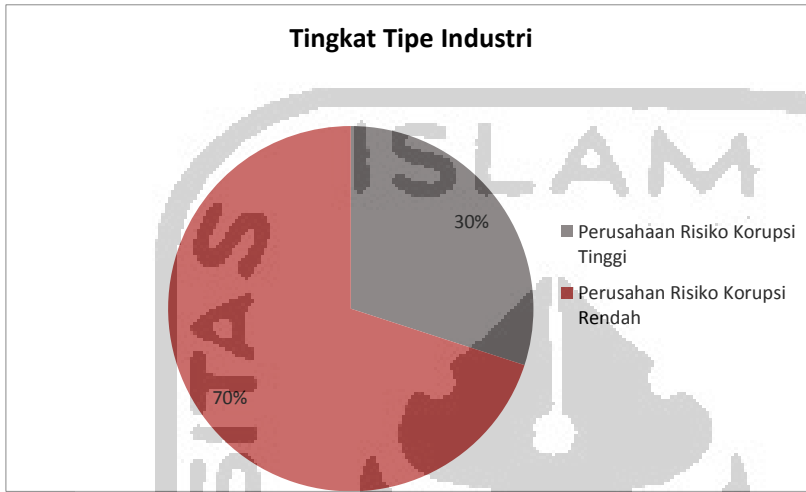
Statistik Deskriptif Variabel Independen diukur secara *Kategorikal*



#### Statistik Deskriptif Variabel Kontrol diukur secara *Continuous*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Dev
Ukuran Perusahaan (dalam jutaan rupiah)	80	921.548	11.126.24 8.442	291.113.2 00	1.257.964.2 00
Kinerja keuangan- (ROA years average)	80	-12,33%	20,72%	4,17%	6,087%

#### Statistik Deskriptif Variabel Kontrol diukur secara Kategorikal



**Statistik Deskriptif Variabel Dependen diukur secara *Continuous***

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Dev
Pelaporan Anti Korupsi (dalam kata)	80	28	1876	706	365,96239

**Tabel Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
--	-------------------------

N		80
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,64758771
Most Extreme Differences	Absolute	,137
	Positive	,082
	Negative	-,137
Kolmogorov-Smirnov Z		1,227
Asymp. Sig. (2-tailed)		,098

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**Tabel Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients<sup>a</sup>

Tabel Hasil Uji Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	7,199	,529		13,611	,000		
good corporate governance	1,671	,796	,335	2,101	,039	,427	2,343
kepemilikan pemerintah	1,310	,516	,286	2,541	,013	,855	1,170
kekuatan dewan direksi	,340	,295	,144	1,153	,253	,693	1,443
tipe industri	-,114	,316	-,057	-,360	,720	,438	2,281
ukuran perusahaan	,018	,080	,045	,225	,822	,268	3,729
kinerja keuangan	1,289	1,264	,107	1,020	,311	,984	1,017

a. Dependent Variable: tingkat pelaporan anti korupsi

### Heteroskedasitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,285	,316		,902	,370

good corporate governance	-,412	,475	-,145	-,868	,388
kepemilikan pemerintah	-,560	,308	-,214	-1,817	,073
kekuatan dewan direksi	-,245	,176	-,182	-1,390	,169
tipe industri	-,022	,189	-,019	-,114	,909
ukuran perusahaan	-,022	,048	-,097	-,463	,645
kinerja keuangan	-,559	,755	-,081	-,740	,462

a. Dependent Variable: ABS\_RES

#### Tabel Hasil Uji F

#### ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8,777	6	1,463	3,223	,007 <sup>b</sup>
	Residual	33,130	73	,454		
	Total	41,907	79			

a. Dependent Variable: tingkat pelaporan anti korupsi

b. Predictors: (Constant), kinerja keuangan, kepemilikan pemerintah, kekuatan dewan direksi, tipe industri, good corporate governance, ukuran perusahaan

#### Tabel Hasil Uji R

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,458 <sup>a</sup>	,209	,144	,67368

a. Predictors: (Constant), kinerja keuangan, kepemilikan pemerintah , kekuatan dewan direksi , tipe industri, good corporate governance, ukuran perusahaan

**Tabel Hasil Uji T**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model\	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,199	,529		13,611	,000
good corporate governance	1,671	,796	,335	2,101	,039
kepemilikan pemerintah	1,310	,516	,286	2,541	,013
kekuatan dewan direksi	,340	,295	,144	1,153	,253
tipe industry	-,114	,316	-,057	-,360	,720
ukuran perusahaan	,018	,080	,045	,225	,822
kinerja keuangan	1,289	1,264	,107	1,020	,311



- a. Dependent Variable: tingkat pelaporan anti korupsi

#### LAMPIRAN 14

#### VERIFIKASI DATA

Sebelum melakukan uji analisis statistik, dilakukan verifikasi data untuk memastikan keakuratan data yang digunakan dalam penelitian. Langkah yang dilakukan antara lain, verifikasi data Variabel Dependen, Variabel Independen, dan Variabel kontrol yang diperoleh dari Laporan Tahunan dan verifikasi data yang dimasukkan dalam file excel.

1. Verifikasi data Variabel Dependen, Independen, dan Kontrol yang diperoleh dari laporan tahunan dan sustainability report.

Satu mahasiswa S1 jurusan akuntansi diminta untuk melakukan input ulang data poin dari variabel dependen, variabel independen, dan

variabel kontrol dari 8 laporan tahunan (10% dari jumlah sampel). Data poin yang diinput sebanyak 178 terdiri dari pelaporan anti korupsi G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5, praktik *good corporate governance*, kekuatan dewan direksi, kepemilikan pemerintah, tipe industri, kinerja keuangan, ukuran perusahaan, total asset 2013 sampai 2017 dan *net income after tax*. Hasil verifikasi kemudian dibandingkan dengan data yang telah diambil oleh peneliti. Adapun tingkat kesepakatan yaitu, 90%.

2. Verifikasi data yang dimasukkan dalam file excel

Hasil verifikasi data file excel input ulang data variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol kemudian dibandingkan dengan file excel yang telah disusun oleh peneliti. Adapaun dari total keseluruhan data poin dari variabel dependen, independen, dan kontrol yang telah diverifikasi terdapat kesalahan yang dilakukan oleh peneliti sebanyak 5,62%. Kesalahan tersebut masih dibawah tingkat kesepakatan yaitu dibawah 10%. Kemudian kesalahan tersebut telah dilakukan pembenaran data.

